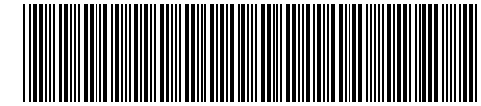




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099137/2019**



DS:0094-0049-0096-3413

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
- Sebesar : Rp. 123.750.000 (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 123.750.000
Rp. 123.750.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	123.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BOJONEGORO (073) Rp. 123.750.000

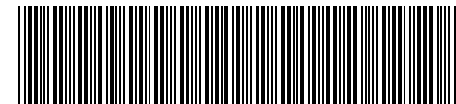
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

JAKARTA, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0094-0049-0096-3413

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. SUBAKI
Bendahara Pengeluaran : HINDRA SUNU SEPTIAWAN
Pejabat Penanda Tangan SPM : JOELIANTO, SH

Halaman : IA.1

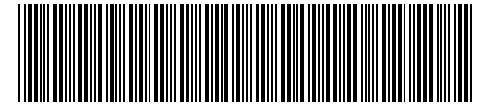
1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			123.750.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			123.750.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			123.750.000
Sasaran Program	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum			
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124495	Perkara	
	02	Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	118766	Jam Layanan	
	03	Pembinaan tenaga teknis peradilan umum	800	Orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	25	satker	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum			
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	124495	Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482	Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3124	Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	0	Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	81	Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			123.750.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum			
	02	Pos bantuan hukum			
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung			
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu			
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	240	Jam Layanan	24.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	118766	Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	250	Perkara	99.750.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	124000	Perkara	

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019**



DS:0094-0049-0096-3413

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	123.750.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	123.750.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0094-0049-0096-3413

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	-	123.750	-	-	-	123.750		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	123.750	-	-	-	123.750		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	123.750	-	-	-	123.750		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	24.000	-	-	-	24.000	05 . 29	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	073	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	99.750	-	-	-	99.750	05 . 29	
01	RM	-	99.750	-	-	-	99.750	073	
JUMLAH		-	123.750	-	-	-	123.750		

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0094-0049-0096-3413

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

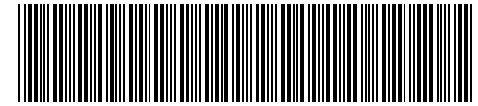
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.139	2.525	4.430	6.782	7.128	7.920	13.749	13.377	14.504	14.801	16.570	20.825	123.750
		52 BELANJA BARANG	1.139	2.525	4.430	6.782	7.128	7.920	13.749	13.377	14.504	14.801	16.570	20.825	123.750
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.139	2.525	4.430	6.782	7.128	7.920	13.749	13.377	14.504	14.801	16.570	20.825	123.750
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.139	2.525	4.430	6.782	7.128	7.920	13.749	13.377	14.504	14.801	16.570	20.825	123.750

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019
IV A. B L O K I R**



DS:0094-0049-0096-3413

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:0094-0049-0096-3413

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004